

## **Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia: Tinjauan Historis dari Masa Pra-Kemerdekaan hingga Kurikulum Merdeka**

**Ghina Sofia Mahfuzah**

*UIN Antasari Banjarmasin*

[\*ghinasofiamahfuzah@gmail.com\*](mailto:ghinasofiamahfuzah@gmail.com)

**Salamah**

*UIN Antasari Banjarmasin*

[\*salamah@uin-antasari.ac.id\*](mailto:salamah@uin-antasari.ac.id)

### **Abstract**

This study aims to examine the historical development of the Islamic Religious Education (PAI) curriculum in Indonesia from the pre-independence period to the implementation of the Merdeka Curriculum. Using a library research approach with descriptive-historical analysis, this article explores the dynamics of curriculum changes influenced by social, political, and educational policy developments in Indonesia. The discussion begins with the condition of Islamic education during the colonial period, when Islamic education received limited attention and was primarily conducted through mosques and pesantren. The study then reviews the development of the PAI curriculum across various periods, including the 1947, 1952-1964, 1968, 1975, 1984, 1994, and Competency-Based Curriculum (KBK) eras, followed by the School-Based Curriculum (KTSP), the 2013 Curriculum, and the Merdeka Curriculum. The findings indicate that the PAI curriculum has continuously evolved from a content-oriented approach toward competency-based, character-oriented, and student-centered learning. Furthermore, the Merdeka Curriculum reflects a more flexible and contextual educational model that emphasizes essential competencies, critical thinking, creativity, and the internalization of Islamic values. Therefore, the development of the PAI curriculum demonstrates Indonesia's ongoing efforts to adapt Islamic education to contemporary educational needs and societal challenges.

**Keywords:** Islamic Religious Education Curriculum, Curriculum Development, Historical Review, Educational Policy, Merdeka Curriculum.

### **Abstract**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga implementasi Kurikulum Merdeka. Penelitian menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan metode deskriptif historis untuk menelaah dinamika perubahan kurikulum yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, politik, dan kebijakan pendidikan nasional. Pembahasan diawali dengan kondisi pendidikan Islam pada masa kolonial yang masih diselenggarakan secara mandiri melalui masjid dan pesantren serta belum memperoleh perhatian yang memadai dari pemerintah kolonial. Selanjutnya, artikel ini menguraikan perkembangan kurikulum PAI pada berbagai periode, mulai dari Kurikulum 1947, 1952-1964, 1968, 1975, 1984, 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Hasil kajian menunjukkan bahwa kurikulum PAI mengalami perkembangan yang berkelanjutan dari pendekatan yang berorientasi pada materi menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi, penguatan karakter, dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum Merdeka menjadi bentuk transformasi terbaru yang menekankan fleksibilitas pembelajaran, penguasaan kompetensi esensial, pengembangan berpikir

kritis dan kreatif, serta penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perkembangan kurikulum PAI mencerminkan upaya adaptasi pendidikan Islam terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman yang terus berkembang.

**Kata Kunci:** Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Perkembangan Kurikulum, Tinjauan Historis, Kebijakan Pendidikan, Kurikulum Merdeka.

## INTRODUCTION

Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual peserta didik. PAI tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Muhaimin, 2003). Oleh karena itu, keberadaan kurikulum PAI menjadi aspek penting dalam mencapai tujuan pendidikan Islam yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Perkembangan kurikulum PAI di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan kebijakan pendidikan yang terjadi dari masa ke masa. Sejak masa pra-kemerdekaan, pendidikan Islam berkembang melalui lembaga-lembaga tradisional seperti masjid, surau, dan pesantren. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan agama sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kondisi tersebut mendorong terjadinya berbagai perubahan kurikulum yang bertujuan menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional (Dhaifi, 2017).

Sejak diberlakukannya Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka, sistem pendidikan Indonesia telah mengalami berbagai pembaruan yang membawa implikasi terhadap pelaksanaan PAI. Setiap kurikulum memiliki karakteristik, orientasi, dan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan kompetensi, karakter, serta kemampuan peserta didik dalam menghadapi tantangan abad ke-21 (Khoirurrijal, 2022).

Kajian mengenai perkembangan kurikulum PAI di Indonesia telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Dhaifi (2017) menjelaskan bahwa perkembangan kurikulum PAI dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap perubahan kurikulum membawa konsekuensi terhadap tujuan, materi, dan strategi pembelajaran PAI.

Selanjutnya, Kiptiyah et al. mengkaji sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Islam melalui perspektif kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan

kurikulum pendidikan Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan kebijakan pemerintah pada setiap periode pemerintahan (Kiptiyah dkk., 2021). Sementara itu, Fithriyyah menegaskan bahwa pendekatan historis memiliki peran penting dalam memahami arah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam karena mampu menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan kebijakan pendidikan (Fithriyyah, 2023).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas perkembangan kurikulum pada periode tertentu atau menitikberatkan pada aspek kebijakan pendidikan. Kajian yang menguraikan perkembangan kurikulum PAI secara komprehensif mulai dari masa pra-kemerdekaan hingga implementasi Kurikulum Merdeka masih relatif terbatas.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, masih terdapat keterbatasan studi yang mengintegrasikan perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam dari masa pra-kemerdekaan hingga Kurikulum Merdeka dalam satu kajian historis yang utuh. Padahal, pemahaman terhadap perjalanan kurikulum secara komprehensif diperlukan untuk melihat pola perubahan, karakteristik, serta relevansinya terhadap kebutuhan pendidikan kontemporer.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga Kurikulum Merdeka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi karakteristik setiap periode perkembangan kurikulum serta menjelaskan implikasinya terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Secara konseptual, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan (Munandar, 2018). Dalam perspektif pendidikan Islam, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan pengembangan nilai-nilai keislaman peserta didik (Muhaimin, 2003).

Perkembangan kurikulum pada dasarnya merupakan proses perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan zaman. Oleh karena itu, perubahan kurikulum PAI di Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi pendidikan Islam terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Kerangka teoritis ini digunakan untuk menganalisis perkembangan kurikulum PAI pada setiap periode serta menjelaskan karakteristik dan arah perubahan yang terjadi dari masa ke masa.

## **METHODS**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui analisis berbagai sumber data yang relevan (Sugiyono, 2019). Adapun penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memanfaatkan berbagai literatur, dokumen, dan hasil penelitian terdahulu sebagai sumber utama data untuk mengkaji suatu fenomena atau permasalahan (Zed, 2025). Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penelaahan buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan regulasi yang berkaitan dengan perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga Kurikulum Merdeka.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-historis. Menurut Gottschalk, metode historis digunakan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan objektif berdasarkan sumber-sumber yang tersedia (Gottschalk, 1986). Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan periodisasi perkembangan kurikulum dan dianalisis untuk mengidentifikasi karakteristik, perubahan, serta arah perkembangan kurikulum PAI pada setiap periode. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam konteks perubahan kebijakan pendidikan nasional di Indonesia.

## **RESULT AND DISCUSSION**

Secara historis, hingga abad ke-19 pendidikan Islam di Indonesia masih banyak diselenggarakan melalui institusi masjid dan pesantren (Asrahah, 1999). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam telah berkembang secara mandiri di tengah masyarakat sebelum masuknya pengaruh kolonial.

Perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem pendidikan nasional. Sebelum kemerdekaan, pendidikan Islam diselenggarakan secara tradisional melalui pesantren, surau, dan masjid dengan fokus pada penguasaan ilmu-ilmu keislaman (Audi dkk., 2024). Pada masa ini belum terdapat kurikulum yang tersusun secara formal sebagaimana sistem pendidikan modern. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional melalui berbagai kebijakan pendidikan.

Pada masa era pra-kemerdekaan, pendidikan agama Islam pada dasarnya kurang mendapatkan perhatian. Sistem pendidikan pada tersebut sangat dipengaruhi oleh kolonialisme, sehingga arah pendidikan lebih ditujukan untuk mencetak masyarakat yang mengabdikan kepada

kepentingan penjajah. Hal ini terjadi karena seluruh kebijakan pendidikan saat itu berfokus pada upaya mendukung kekuasaan kolonial (Ali & Al, 2003).

Awalnya, kedatangan bangsa Eropa bukan untuk mengembangkan pendidikan, melainkan semata-mata mencari rempah-rempah. Namun, mereka juga membawa misi penyebaran agama. Oleh karena itu, pada abad ke-16 dan ke-17, didirikan berbagai lembaga pendidikan sebagai sarana penyebaran agama Kristen di Nusantara. Lembaga tersebut tidak hanya ditujukan bagi orang Eropa, tetapi juga bagi penduduk pribumi yang memeluk agama Kristen.

Selanjutnya, ketika penjajah membutuhkan tenaga kerja yang mampu membaca dan menulis untuk menunjang sistem tanam paksa, mereka mendirikan lembaga pendidikan. Namun, pendidikan ini bukan untuk memajukan pribumi, melainkan demi kepentingan administrasi kolonial, dan hanya terbatas bagi kalangan tertentu seperti anak-anak priyayi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam pada masa pra-kemerdekaan kurang mendapat perhatian. Sistem pendidikan saat itu dipengaruhi oleh kolonialisme dan berpusat pada kepentingan serta agama penjajah. Selain itu, akses pendidikan sangat terbatas, hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu seperti anak-anak priyayi. Pendidikan kolonial bertujuan mencetak tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan oleh penjajah, bukan untuk membentuk generasi yang mengabdikan kepada bangsa. Bahkan, pendidikan dijadikan sarana untuk menanamkan nilai dan norma penjajah agar diadopsi oleh pribumi, sehingga mereka cenderung tunduk dan mendukung sistem kolonial (Dhaifi, 2017).

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan setelah kemerdekaan. Perubahan ini mendorong adanya pembaruan kurikulum, termasuk pendidikan agama Islam, agar lebih sesuai dengan kebutuhan bangsa. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji perkembangan kurikulum PAI di Indonesia mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka.

## **A. Kurikulum 1947-2006**

### 1. Sejarah Kurikulum Pendidikan Agama Islam Masa Orde Lama

Kurikulum pada era Orde Lama dibagi menjadi 2 kurikulum, di antaranya:

#### a. Kurikulum 1947

Sehubungan karena beberapa sebab, kurikulum ini dalam praktiknya baru dilaksanakan pada tahun 1950. Oleh sebab itu, banyak kalangan menyebutkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia secara formal dimulai tahun 1950. Keberadaan pendidikan agama Islam telah diatur pelaksanaannya dalam SKB dua menteri (Menteri PP & K dan Menteri Agama) tahun 1946. Kurikulum 1947 ini masih kental dengan corak sistem pendidikan Jepang ataupun Belanda

(Sutrisno & Albarobis, 2012). Hal ini terjadi mungkin disebabkan karena Negara ini baru merdeka. Sehingga, proses pendidikan lebih ditekankan untuk mewujudkan manusia yang cinta Negara, sehingga menjadi berdaulat dan tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara.

b. Kurikulum 1952-1964

Dalam kurikulum ini muatannya adalah pada pengajaran yang harus disampaikan pada siswa, dalam bentuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, dan sejarah. Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum ini sebagaimana diatur dalam UUPPP (Undang-Undang Pokok (Pendidikan dan Pengajaran) nomor 4 tahun 1950. Selanjutnya, muncul SKB dua menteri tahun 1951 yang menegaskan bahwa pendidikan agama wajib diselenggarakan di sekolah-sekolah, minimal 2 jam per minggu.

Selain itu, DEPAG juga telah mengupayakan terbentuknya kurikulum agama di sekolah maupun pesantren, akhirnya dibentuklah tim yang diketuai oleh K.H. Imam Zarkasyi dari Pondok Pesantren Gontor yang berhasil menyusun kurikulum agama yang kemudian disahkan oleh menteri agama pada tahun 1952. Disebutkan bahwa, setelah DEPAG berhasil menyusun kurikulum itu, pendidikan agama memperoleh porsi 25 % dari keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan sekolah selama seminggu.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Kurikulum 1947 masih kental dengan corak sistem pendidikan Jepang ataupun Belanda, adapun Kurikulum tahun 1952-1964 diprakarsai oleh DEPAG dengan membentuk tim yang diketuai oleh K.H. Imam Zarkasyi dari Pondok Pesantren Gontor yang berhasil menyusun kurikulum agama yang kemudian disahkan oleh menteri agama pada tahun 1952. Disebutkan bahwa, setelah DEPAG berhasil menyusun kurikulum itu, pendidikan agama memperoleh porsi 25 % dari keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan sekolah selama seminggu (Sutrisno & Albarobis, 2012).

2. Sejarah Kurikulum Pendidikan Agama Islam Masa Orde Baru

Peralihan dari masa Orde Lama ke Orde Baru turut membawa perubahan dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dari pergantian kurikulum yang sebelumnya digunakan, serta berlanjut dengan beberapa kali pembaruan kurikulum pada masa Orde Baru. Berikut ini merupakan beberapa model kurikulum yang diterapkan pada era Orde Baru:

a. Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 dapat dikatakan sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1964. Sejak masa kemerdekaan, kurikulum ini mulai menerapkan model yang lebih terintegrasi. Fokusnya pun tidak lagi pada konsep pancawardhana seperti pada kurikulum sebelumnya. Meskipun demikian, dalam

hal pelaksanaan pendidikan agama, kebijakan yang diterapkan relatif masih serupa dengan kurikulum 1964.

#### b. Kurikulum 1975

Dalam kurikulum ini, orientasi pendidikan diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Pada masa ini mulai dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pembelajaran untuk setiap pokok bahasan. Selain itu, tujuan pendidikan disusun secara berjenjang, meliputi tujuan pendidikan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus.

Pendidikan agama Islam dalam kurikulum 1975 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Melalui SKB Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri P&K) serta penyusunan kurikulum madrasah 1975, pendidikan agama memperoleh porsi sekitar 30%, sedangkan pendidikan umum 70%. Dengan kebijakan tersebut, ijazah madrasah disetarakan dengan ijazah sekolah umum, sehingga siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapkannya kurikulum 1975 (Mulyasa, 2003).

#### c. Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 dapat dipandang sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1975. Dalam kurikulum ini, peran siswa menjadi lebih aktif, mulai dari mengamati, mengelompokkan, berdiskusi, hingga melaporkan hasil pembelajaran. Pendekatan ini dikenal dengan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning* (SAL), yang menempatkan guru sebagai fasilitator sehingga metode ceramah tidak lagi menjadi dominan. Selain itu, posisi pendidikan agama semakin diperkuat melalui SKB Dua Menteri (Menteri P&K dan Menteri Dalam Negeri), yang menegaskan bahwa lulusan madrasah memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah umum (Sutrisno & Albarobis, 2012).

#### d. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Kurikulum 1994 merupakan hasil penyempurnaan dengan memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, khususnya kurikulum 1975 dan 1984. Hal penting pada periode ini adalah terbitnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 2 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan berciri khas Islam. Artinya, muatan, struktur, dan konsep kurikulumnya selaras dengan nilai-nilai Islam. Lebih lanjut, melalui UU tersebut, pendidikan agama Islam secara resmi menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Baru melalui kurikulum 1968, 1975, 1984, 1994, hingga suplemen kurikulum 1999 pendidikan agama Islam telah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional (Mulyasa, 2003).

### 3. Sejarah Kurikulum Pendidikan Agama Islam Masa Reformasi

Sejarah menunjukkan bahwa pergantian rezim pemerintahan seringkali membawa perubahan terhadap kebijakan yang berlaku, termasuk dalam bidang pendidikan. Era reformasi yang menekankan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas turut memberikan pengaruh besar terhadap sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dari adanya berbagai pembaruan kurikulum pada masa tersebut, termasuk dalam pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, kurikulum pada era reformasi mengalami beberapa perubahan, di antaranya:

#### a. Kurikulum KBK

Era reformasi memberikan ruang yang luas bagi lahirnya kebijakan pendidikan baru yang bersifat lebih reformatif dan inovatif. Era ini memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mulyasa, 2003). Salah satu dampak dari perubahan tersebut adalah diterapkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang menekankan pada pengembangan kemampuan peserta didik.

Untuk memperkuat arah kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti UU Nomor 2 Tahun 1989. Dalam undang-undang ini, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya, baik dalam aspek spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, maupun keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun karakteristik utama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) antara lain:

- 1) Menekankan pada pencapaian kompetensi peserta didik, bukan sekadar ketuntasan materi.
- 2) Kurikulum bersifat fleksibel, sehingga dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi peserta didik.
- 3) Berpusat pada peserta didik (student centered).
- 4) Berorientasi pada proses dan hasil pembelajaran.
- 5) Menggunakan pendekatan dan metode yang beragam serta kontekstual.
- 6) Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator.

- 7) Sumber belajar tidak terbatas pada buku pelajaran, tetapi dapat berasal dari berbagai media dan lingkungan.
- 8) Mendorong konsep belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*), yang meliputi:
  - a) Belajar untuk mengetahui (*learning to know*),
  - b) Belajar untuk melakukan (*learning to do*)
  - c) Belajar untuk menjadi diri sendiri (*learning to be*),
  - d) Belajar untuk hidup bersama (*learning to live together*).

Dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM), pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada *Contextual Teaching and Learning* (CTL), yang mencakup unsur konstruktivisme, inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, serta penilaian autentik. Seiring dengan diterapkannya Kurikulum 2004, hal tersebut memberikan implikasi langsung terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam, di mana madrasah mulai menjadikan kompetensi sebagai dasar utama dalam pembelajaran, sehingga tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan peserta didik secara menyeluruh (Suharto, 2011).

Secara umum, keberadaan kurikulum merupakan unsur yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya kurikulum, akan sulit untuk menerjemahkan dan mewujudkan tujuan pendidikan secara sistematis (Suharto, 2011). Dengan demikian, penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada era reformasi tidak hanya membawa perubahan pada sistem pembelajaran secara umum, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam yang semakin menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan dalam mengarahkan proses pendidikan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan sistematis.

### **B. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

Secara umum, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tidak jauh berbeda dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Perbedaan utamanya terletak pada kewenangan dalam penyusunannya yang lebih menekankan pada prinsip desentralisasi pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah pusat hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum, khususnya dalam penyusunan silabus dan sistem penilaian, yang disesuaikan dengan kondisi sekolah serta karakteristik daerah masing-masing.

KTSP merupakan kurikulum operasional yang dirancang dan dilaksanakan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah. Pemerintah pusat berperan sebagai

pemberi pedoman umum yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum tersebut. Dengan demikian, sekolah memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta lingkungan sekitarnya. Hal ini menjadikan KTSP lebih menekankan pada penguatan aspek lokalitas dalam pendidikan, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi nyata peserta didik (Fithriyyah, 2023).

Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan agama islam di madrasah/sekolah, dijabarkan dalam kurikulum agama yang dikeluarkan oleh KEMENAG, dan tepat pada bulan Mei 2008 menteri Agama menandatangani PERMENAG no 02 tahun 2008, menyangkut standar kompetensi lulusan dan standar isi PAI (Ratih Rizki Pradika, 2020).

Kelompok Mata Pelajaran, ada 5 yaitu, Agama dan akhlak mulia , Kewarganegaraan dan kepribadian, Ilmu pengetahuan dan teknologi, Estetika dan Jasmani, olahraga, dan kesehatan (Hidayat, 2020).

### **C. Kurikulum 2013**

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan perkembangan zaman, terutama di era digital yang menuntut pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum ini kemudian disempurnakan menjadi Kurikulum 2013 yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2013/2014.

Dalam kurikulum ini, standar proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, tetapi juga mencakup kegiatan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, hingga mencipta. Selain itu, proses pembelajaran tidak terbatas di dalam kelas, melainkan juga berlangsung di lingkungan sekolah dan masyarakat, serta penanaman sikap dilakukan melalui keteladanan, bukan sekadar penyampaian secara verbal (Asri, 2017).

Sejalan dengan hal tersebut, Kurikulum 2013 lebih menekankan pada penguatan pendidikan karakter dengan tujuan membentuk peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Kurikulum ini juga mengintegrasikan pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara holistik, di mana ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam penilaian hasil belajar, termasuk dalam penentuan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik (Munandar, 2018).

Adapun beberapa karakteristik utama Kurikulum 2013 antara lain mewujudkan pendidikan berkarakter, yaitu

1. Mewujudkan Pendidikan Berkarakter

Pendidikan berkarakter menjadi salah satu fokus utama dalam Kurikulum 2013. Pada dasarnya, aspek ini telah ada dalam kurikulum sebelumnya, yaitu menekankan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, bermoral, dan berbudi pekerti baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kekurangan yang memunculkan kritik. Oleh karena itu, kurikulum ini dikembangkan dan disempurnakan agar mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif, berkelanjutan, serta berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

## 2. Mengembangkan Pendidikan Berwawasan Lokal

Kurikulum 2013 juga menekankan pentingnya penguatan wawasan lokal dalam proses pendidikan. Selama ini, nilai-nilai budaya lokal cenderung terabaikan akibat pengaruh budaya modern yang semakin kuat. Kondisi ini mendorong perlunya integrasi budaya lokal dalam pembelajaran, sehingga peserta didik tetap mengenal dan menghargai warisan budaya daerahnya. Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu menjadikan budaya lokal sebagai sumber inspirasi sekaligus bagian penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak hilang ditelan perkembangan zaman.

## 3. Mewujudkan Pendidikan yang Menyenangkan dan Bersahabat

Dalam Kurikulum 2013, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran dirancang agar lebih menyenangkan, interaktif, dan bersahabat. Melalui pendekatan ini, diharapkan potensi akademik maupun non-akademik peserta didik dapat berkembang secara optimal, sehingga kreativitas, inovasi, dan kemampuan mereka dapat terasah dengan baik (Dhaifi, 2017).

Dengan pendekatan tersebut, Kurikulum 2013 diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna dan mendorong perkembangan peserta didik secara menyeluruh.

## **D. Kurikulum Merdeka**

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang menekankan pembelajaran intrakurikuler yang beragam serta berfokus pada penguasaan materi esensial. Kehadirannya dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan perubahan sistem pendidikan, terutama sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang menuntut fleksibilitas dalam proses belajar mengajar. Kebijakan Merdeka Belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar memiliki daya saing global. Selain itu, kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan pendidikan sebelumnya, seperti aturan yang kaku, rendahnya capaian peserta didik dalam tes internasional, serta beragamnya kondisi dan tantangan pendidikan di setiap daerah (Khoirurrijal, 2022).

Dalam implementasinya, Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada peserta didik, memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga dapat dilakukan di luar kelas agar lebih kontekstual. Melalui pendekatan ini, peserta didik memiliki peluang lebih besar untuk berdiskusi, meningkatkan keberanian dalam berpartisipasi, kemampuan bersosialisasi, serta kompetensi yang mereka miliki, sehingga karakter mereka dapat berkembang secara alami. Selain itu, Kurikulum Merdeka menekankan penguatan kompetensi melalui pendalaman konsep serta pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, dengan guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses internalisasi nilai-nilai keagamaan dan akademik (Dwi Lestari dkk., 2022).

Kurikulum ini juga menilai kemampuan siswa tidak hanya berdasarkan nilai akademik, tetapi mempertimbangkan etika, sikap, dan keterampilan peserta didik dalam berbagai bidang ilmu. Peserta didik diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mereka, sementara guru diharapkan menciptakan konsep pembelajaran yang inovatif, aktif, dan produktif. Kebebasan berpikir dan kolaborasi antara guru dan siswa menjadi ciri utama dalam kurikulum ini, mendukung terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, menarik, dan berdaya guna (Nasution, 2022).

Bagi pendidikan agama Islam, Kurikulum Merdeka membawa perubahan signifikan. Pembelajaran PAI tidak lagi berorientasi hanya pada penyampaian materi teoritis, tetapi juga menekankan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fokus pada materi esensial dan pembelajaran yang kontekstual, peserta didik diharapkan mengembangkan sikap religius, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran dalam mengamalkan ajaran agama. Peran guru PAI pun berubah menjadi fasilitator yang membimbing proses pembelajaran, bukan sekadar pusat penyampaian materi (Rahmat & Al Mubarak, 2019).

Perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam dari masa pra-kemerdekaan hingga Kurikulum Merdeka menunjukkan dinamika yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Pembelajaran PAI kini telah berkembang dari metode sederhana menjadi pembelajaran yang berbasis kompetensi, inovatif, aktif, dan produktif. Walaupun implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, Kurikulum Merdeka tetap berupaya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi guru, siswa, dan orang tua (Nasution, 2022).

Dengan demikian, Kurikulum Merdeka dapat dipahami sebagai langkah strategis dalam menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan zaman, sekaligus mendorong pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan karakter, termasuk dalam pendidikan agama Islam.

## CONCLUSION

Perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia menunjukkan adanya perubahan yang terus berlangsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pendidikan nasional. Dari masa pra-kemerdekaan hingga Kurikulum Merdeka, kurikulum PAI mengalami perubahan dalam tujuan, isi, dan pendekatan pembelajaran. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran dari pembelajaran yang berfokus pada penyampaian materi menuju pembelajaran yang lebih menekankan kompetensi, karakter, dan keterlibatan aktif peserta didik.

Kurikulum Merdeka menjadi bentuk pengembangan terbaru yang memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran serta mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perkembangan kurikulum PAI dapat dipahami sebagai upaya untuk menyesuaikan pendidikan Islam dengan tuntutan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI di berbagai jenjang pendidikan.

## REFERENCES

- Ali, M., & Al, H. (2003). *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*. Pedoman Ilmu Jaya.
- Asrahah, H. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Asri, M. (2017). *Dinamika Kurikulum di Indonesia*. 4(2).  
<https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/128>.
- Audi, A. A. P. J., Hamami, T., Gonibala, M. L., & Bonde, F. M. F. (2024). Perkembangan dan Problematika Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia. *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 10(4), 1648–1664. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v10i4.1210](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i4.1210)
- Dhaifi, A. (2017). Perkembangan Kurikulum PAI di Indonesia. *Edureligia*, 1(1).  
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/edureligia/article/viewFile/47/43>
- Dwi Lestari, A., Pratiwi, R., & Julaiha Nasion, S. (2022). Strategi Pembelajaran Contextual Teaching Learning pada Sejarah Kebudayaan Islam. *Journal of Educational Management and Strategy*, 1(1), 40–45. <https://doi.org/10.57255/jemast.v1i1.56>
- Fithriyyah, F. (2023). Tinjauan Historis dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 9(4).
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti sejarah*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Hidayat, R. (2020). Problematika Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 145–156.
- Khoirurrijal. (2022). *Pengembangan Kurikulum Merdeka*. CV. Lestari Nusantara Abadi.
- Kiptiyah, M., Sukarno, S., & El Widda, M. (2021). Sejarah Perkembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia (Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam). *Jurnal Literasiologi*, 6(2). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v6i2>
- Muhaimin. (2003). *Wacana pengembangan pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar bekerjasama dengan PSAPM, Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat, Surabaya.
- Mulyasa, M. (2003). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. PT. Remaja Rosdakarya.

- Munandar, A. (2018). *Pengantar Kurikulum*. Deepublish.
- Nasution, S. W. (2022). Asesment Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar. *Prosiding Pendidikan Dasar*, 1(1), 135–142. <https://doi.org/10.34007/ppd.v1i1.181>
- Rahmat, R., & Al Mubarak, M. (2019). *Proses Pengembangan Kurikulum*. *Islamika*. 1(2). <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/193>
- Ratih Rizki Pradika, A. (2020). *Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. 7(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. <http://archive.org/details/buku-metode-penelitian-sugiyono>
- Suharto, T. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam*. Ar-Ruzz Media.
- Sutrisno, S., & Albarobis, M. (2012). *Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial*. Ar-Ruzz Media,.
- Zed, M. (2025). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.